

GERAKAN NASIONAL “AYO KERJA” SECERCAH OPTIMISME UKM MENYONGSONG MEA 2015

ABSTRAK

Dwi Sambada, FKIP-UT UPBJJ Surabaya
(*dwisambada@ut.ac.id*)

Kunci utama dalam menghadapi tantangan di kancah MEA adalah “daya saing” yang handal. Pemberlakuan MEA 2015 akan dapat menjadikan kita sebagai konsumen, yang ditandai dengan hanya menjadi pasar impor, apabila tanpa persiapan yang matang dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Produktivitas yang tinggi mencerminkan daya saing tinggi dan daya saing tinggi berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk bisa menjadi negara dengan daya saing tinggi harus ada beberapa strategi yang harus terpenuhi diantaranya meliputi infrastruktur, kualitas birokrasi, stabilitas ekonomi makro, serta pendidikan, yang kesemuanya bermuara pada upaya meningkatkan daya saing ekonomi.

Produktifitas yang tinggi dapat dicapai, dengan meningkatkan budaya kerja/etos kerja yang baik dan kreatif untuk meningkatkan kualitas suatu produk barang dan jasa. Langkah pemerintah untuk menyemangati melalui jargon "Ayo Kerja" sangat bagus jika diiringi dengan kebijakan yang dapat meningkatkan kesempatan kerja atau mendorong terciptanya lapangan-lapangan pekerjaan baru.

Potensi besar industri kreatif dapat membawa kemajuan pada ekonomi bangsa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dapat lepas dari peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) karena jumlah unit usahanya sangat besar serta menyerap banyak tenaga kerja. UMKM bisa dikatakan merupakan sektor strategis bagi pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Karena UMKM memiliki beberapa kelebihan, diantaranya : **pertama**, jumlah industri yang besar dan terdapat pada setiap sektor-sektor ekonomi. **Kedua**, potensinya sangat tinggi dalam penyerapan tenaga kerja. **Ketiga**, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup tinggi yaitu sekitar 55,3 persen dari total PDB. Bisa dikatakan bahwa perkembangan UMKM selain menciptakan kesempatan kerja di masyarakat juga menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemerintah dalam rangka menghadapi MEA telah menyiapkan kebijakan khusus untuk UMKM. Kebijakan yang pertama adalah peningkatan sentra atau klaster dalam upaya pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan *One Village One Product* atau OVOP. Kebijakan yang kedua yaitu akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kewirausahaan. Peningkatan sumber daya manusia menjadi sangat penting karena menjadi faktor utama terkait dengan perkembangan dan kemajuan UMKM dalam persaingan global. Sumber daya manusia merupakan kunci dari berhasil tidaknya, berkualitas atau tidaknya suatu hasil usaha. Untuk menghadapi MEA 2015, SDM yang dibutuhkan adalah SDM yang inovatif, kreatif, dan kompetitif.

Peningkatan daya saing dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), diperlukan para pelaku UKM di Indonesia untuk menghadapi persaingan usaha yang makin ketat, khususnya dalam menghadapi MEA. Bagi Indonesia, UKM memiliki peran dan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional, karena menyumbang 53,3% dari total PDB (Pendapatan Domestik Bruto). UKM di Indonesia bergerak di sektor pertanian, industri dan keuangan.

Keunggulan UKM dibanding Usaha Besar (*Nigel, 2012*) yaitu : inovasi teknologi mudah dilakukan dalam upaya pengembangan produk, hubungan kemanusiaan yang akrab terjalin dalam usaha kecil, kemampuan menciptakan kesempatan tenaga kerja yang cukup tinggi, fleksibel dan mudah menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat, dan manajerial yang dinamis dan peran kewirausahaan. UMKM dinilai lebih luwes jika dibandingkan dengan sektor usaha besar lainnya karena peran strategis UMKM mampu memberi kontribusi besar terhadap perekonomian riil Indonesia.

Kesadaran semua warga bangsa meningkatkan etos kerja disegala bidang sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi dan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan agar mampu bersaing dengan Negara-negara lain di ASEAN.

Kata kunci : daya saing, UKM, etos kerja

GERAKAN NASIONAL “AYO KERJA” SECERCAH OPTIMISME
UKM MENYONGSONG MEA 2015

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berusia tujuh puluh tahun merdeka. Ini momentum jembatan emas dalam mewujudkan semua harapan berbangsa dan bernegara, yakni: memiliki Indonesia yang “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Kata “melindungi” tentunya memiliki makna yang sangat luas, tidak hanya terkait dengan keamanan dan keselamatan jiwa secara fisik saja, tetapi mencakup perlindungan semua aspek didalamnya aspek ekonomi masyarakat. Begitu juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bisa terwujud apabila seluruh atau sebagian besar warga bangsa ini menyadari dan melaksanakan dengan penuh kesadaran akan pentingnya kerja keras, inovasi dan kreatifitas di segala lini kehidupan.

Presiden Joko Widodo ingin menggunakan momentum perayaan 70 tahun Indonesia merdeka untuk memperbaiki tekad dalam mewujudkan harapan seluruh rakyat Indonesia. Harapan dari segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Harapan tersebut diantaranya kesiapan bangsa Indonesia menghadapi MEA. Keprihatinan terhadap Etos kerja bangsa ini secara kasat mata nampak kurang disiplin, kurang produktif dan kurang inovatif. Kita melihat banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak produktif, sehingga kita masih terbelenggu dalam kebodohan, kemiskinan, dan sering kalah dalam setiap persaingan.

Kunci utama dalam menghadapi tantangan di kancah MEA adalah “daya saing” yang handal. Pemberlakuan MEA 2015 akan dapat menjadikan kita sebagai konsumen, yang ditandai dengan hanya menjadi pasar impor. Apabila tanpa persiapan yang matang dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Apalagi saat ini Indonesia adalah pengimpor pangan yang sangat besar. Jika tidak mampu meningkatkan produksi pangannya secara mandiri, yang

sangat besar. Jika tidak mampu meningkatkan produksi pangannya secara mandiri, Indonesia akan terus mengalami defisit neraca perdagangan yang berdampak pada melemahnya nilai Rupiah.

Produktivitas yang tinggi mencerminkan daya saing tinggi dan daya saing tinggi berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk bisa menjadi negara dengan daya saing tinggi harus ada beberapa yang harus terpenuhi diantaranya meliputi infrastruktur, kualitas birokrasi, stabilitas ekonomi makro, serta pendidikan, yang kesemuanya bermuara pada upaya meningkatkan daya saing ekonomi. Produktifitas yang tinggi dapat dicapai, dengan meningkatkan budaya kerja yang baik dan kreatif untuk meningkatkan kualitas suatu produk barang dan jasa.

Dapatkah kita bayangkan jika Indonesia tidak memiliki budaya kerja positif dalam menghadapi MEA/AEC?, dimana arus barang sangat bebas keluar masuk kesetiap negara serta sangat mudahnya para individu untuk bekerja dinegara manapun yang dia suka. Kualitas mutu dan kompetensi SDM yang baik sangat dibutuhkan dalam menghadapi atmosfer seperti ini. Tentunya semua dimulai dengan membangun budaya kerja positif yang disiplin dan fokus terhadap tujuan, sebab budaya kerja mampu mengubah perilaku individu untuk meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kepuasan kerja, menjamin hasil kerja berkualitas, memperkuat jaringan kerja (*networking*), menjamin keterbukaan (*accountable*), dan membangun kebersamaan yang baik dalam lingkungan pekerjaan.

Maka dari itu budaya kerja positif sangatlah penting dibangun oleh elemen-elemen bangsa seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat madani sebagai bekal dalam menghadapi atmosfer persaingan bisnis yang sebentar lagi akan kita hadapi yaitu ASEAN Economics Community.

Langkah pemerintah untuk menyemangati melalui jargon "Ayo Kerja" sebenarnya sudah baik. Namun akan lebih ideal jika jargon itu turut diiringi dengan kebijakan yang dapat meningkatkan kesempatan kerja atau mendorong terciptanya lapangan-lapangan pekerjaan baru. Tak boleh dilupakan juga, perlu kiranya mempertimbangkan untuk memperbanyak program-program pelatihan ketenagakerjaan. Ujungnya dapat menambah skill atau kualitas para pekerja

Indonesia yang nantinya mampu memenuhi persyaratan kerja yang semakin menuntut kualifikasi tinggi.

Gerakan Nasional “Ayo Kerja” tidak ingin berhenti pada slogan ataupun perayaan semata, tapi gerakan nyata yang membangkitkan semangat rakyat dalam mewujudkan impian Indonesia Merdeka. Gerakan ini mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat, turun tangan secara bersama-sama mewujudkan impiannya. Sementara etos kerja orang Indonesia yang menurut Mochtar Lubis dalam bukunya berjudul "Manusia Indonesia" yang terbit sekitar tahun 1977/1978, memberikan penilaian tentang sifat-sifat negatif manusia Indonesia. Hipokrit alias Munafik, Segan dan Enggan Bertanggung Jawab, Berjiwa Feodal, Percaya Takhayul, Artistik, Watak yang Lemah, Tidak Hemat, Lebih suka tidak bekerja keras, kecuali kalau terpaksa, Manusia Indonesia Tukang Menggerutu/ Berani Berbicara di Belakang, Cepat Cemburu dan Dengki, Manusia Yang Sok, Manusia Plagiat. Dari 12 Sifat Negatif harus kita ubah atau kita buang dan kemudian merubahnya menjadi yang lebih positif dimulai dari diri kita sendiri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Temu Kreatif Nasional yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Serpong, Banten, Selasa (4/8) saat diminta menuliskan pesan dalam Temu Kreatif Nasional itu, Presiden Jokowi menulis, “Era Ekonomi Kreatif harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.” Begitu pula saat memberikan sambutan Jokowi menyampaikan “Pemerintah sangat berkomitmen untuk memberikan anggaran. Dengan dukungan ini, industri kreatif diharapkan dapat *take-off* dengan baik dan semua mendapat manfaat," kata Presiden Jokowi di kutip dari koran Kompas.

Potensi besar industri kreatif dapat membawa kemajuan pada ekonomi bangsa namun dalam pelaksanaannya masih banyak para pemain industri kreatif merasa kurang mendapatkan dukungan. Kita mengenal para penggerak di Bidang Industri Kreatif yang memiliki rekam jejak panjang di industri dan memiliki rekam prestasi yang baik dalam sektor yang digeluti. Mereka adalah Lucky Kuswandi (film), Nadiem Makarim (aplikasi), Yovie Widiyanto (musik), Ratna Riantiarno (seni pertunjukan), Dewi Lestari (penerbitan), dan Singgih Kartono (desain produk) <http://indonesia70tahun.id/berita/2015/08/04/saatnya-industri-kreatif-yang-menjadi-andalan-ekonomi/#.Vh8OAm7BAdu>.

Sebaiknya kita harus bangkit dari keterpurukan di segala bidang karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar yang ada di kawasan ASEAN. Indonesia mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup bagus, pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia (4,5%) setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan India. Ini akan menjadi modal yang penting untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menuju AEC tahun 2015.

Sebagai salah satu dari tiga pilar utama ASEAN Community 2015, ASEAN Economic Community yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan Negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi Negara ASEAN saat ini.

Selain itu juga dengan terwujudnya ASEAN Community, dimana di dalamnya terdapat AEC, dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategis di kancah Internasional. Masyarakat Indonesia mengharapkan dengan terwujudnya komunitas masyarakat ekonomi ASEAN ini dapat membuka mata semua pihak, sehingga terjadi suatu dialog antar sektor dimana nantinya juga saling melengkapi diantara para stakeholder sektor ekonomi di Negara- Negara ASEAN ini sangat penting. Untuk itu kita harus mampu meningkatkan kepercayaan diri bahwa sebetulnya apabila kita memiliki kekuatan untuk bisa bangkit dan terus menjaga kesinambungan stabilitas ekonomi kita yang sejak awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini terus meningkat, angka kemiskinan dapat ditekan seminim mungkin, dan progres dalam bidang ekonomi lainnya pun mengalami kemajuan yang cukup signifikan.

Dengan hal tersebut banyak sekali yang bisa kita wujudkan terutama dengan merealisasikan ASEAN Economy Community 2015 ini. Stabilitas ekonomi Indonesia yang kondusif ini merupakan sebuah opportunity dimana Indonesia akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri, apalagi dengan sumber daya alam yang begitu besar, maka akan sangat tidak masuk akal apabila kita tidak bisa berbuat sesuatu dengan hal tersebut.

Untuk pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015, ASEAN menyepakati pewujudannya diarahkan pada integrasi ekonomi kawasan yang implementasinya mengacu pada ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint AEC. Blueprint merupakan pedoman bagi Negara-negara Anggota ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015.

AEC Blueprint memuat empat pilar utama yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Telah disepakati pada sesi pleno ASEAN Summit di Phnom Penh, Kamboja bahwa tanggal berlakunya MEA adalah tanggal 31 Desember 2015. Mulai dengan tanggal tersebut nantinya ASEAN akan menjadi pasar bebas perdagangan tanpa hambatan tarif dan non-tarif, konektivitas, transportasi, investasi, dll.

Bank Indonesia (BI) menyatakan kondisi perekonomian saat ini berbeda dengan kondisi pada 1997 atau 1998. Gubernur BI Agus Martowardojo menegaskan kondisi fundamental ekonomi di 2015 berbeda bila dibandingkan keadaan menjelang krisis 1997 sampai 1998. "Secara fundamental, Indonesia saat ini lebih baik. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator perekonomian," ujar Agus Martowardoyo.

Pada 1998, kata dia, pertumbuhan ekonomi tumbuh negatif sebesar -13,13 persen. Sedangkan saat ini diperkirakan masih tumbuh positif 4,9 persen. Selanjutnya, kata dia, cadangan devisa pada 1997/1998 hanya sekitar 23 miliar dolar AS. Namun sekarang pada Juli 2015 sebesar 107,6 miliar dolar AS. Sementara tingkat inflasi pada 1998 pun mencapai 77,63 persen. Sedangkan saat ini, kata Agus, mengarah pada inflasi rendah dan stabil yaitu 4 ± 1 persen di 2015 dan 2016.

Tak hanya itu, rasio Utang Luar Negeri (ULN) pada 1998 sekitar 120 persen dari GDP. Sebaliknya, tahun ini hanya 33 persen dari GDP. "Dari sisi stabilitas sistem keuangan, pada 1998, ketahanan permodalan cenderung kurang dan rasio kredit bermasalah relatif besar.

Sementara pada posisi Juni 2015 CAR perbankan sebesar 20,1 persen, dengan NPL 2,6 persen (gross)," jelas Agus. Maka kemungkinan tak akan terjadi krisis ekonomi seperti pada 1997 sampai 1998.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dapat lepas dari peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) karena jumlah unit usaha sangat besar (tercatat sekitar 3,4juta), serta menyerap banyak tenaga kerja (tahun 2006 sebanyak 8,7 juta orang). Sebagai kreditor UKM relatif patuh dalam pengembalian modal, di samping UKM memiliki daya tahan cukup tinggi dalam menghadapi berbagai gejolak, krisis moneter tahun 1997 sebagai contohnya, Suhendi, dkk,(2014).

UKM perlu dipersiapkan agar mampu bertahan hidup dan berkembang walaupun harus menghadapi persaingan dengan pelaku ekonomi yang lebih kuat, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Berbagai program pembinaan terhadap UKM yang dilakukan selama ini tampaknya tidak terlalu memperhatikan ciri-ciri khas UKM yang sesungguhnya perlu dimanfaatkan secara tepat agar dapat menjadi kekuatan yang sulit disaingi oleh pelaku-pelaku ekonomi yang lebih kuat. Ciri-ciri tersebut antara lain : Umumnya dikelola oleh pemiliknya sendiri, struktur organisasinya sederhana, pemilik mengenal karyawan dengan baik, persentase kegagalan perusahaan tinggi, kurangnya manager ahli, modal jangka panjang sulit didapat serta jumlah karyawan sedikit. Ciri-ciri yang demikian tadi sehingga membuat UKM memiliki daya saing yang rendah terhadap barang-barang import. baik yang resmi maupun selundupan.

Kondisi UMKM di Indonesia

Peranan kewirausahaan di Indonesia dalam meningkatkan daya dukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi penduduk Indonesia sangat berarti. Namun masih diperlukan banyak tambahan usaha baru dari yang sudah ada karena tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Hal tersebut berarti harus menumbuhkan usaha baru di Indonesia. Sejak tahun 2005 telah dicanangkan pertumbuhan 6 juta unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) baru di Indonesia. Tentunya ada korelasi positif antara kegiatan wirausaha (*entrepreneurial activities*) dengan pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Sejak pemerintahan SBY-JK, salah satu kebijakan yang mendorong masyarakat Indonesia untuk berwirausaha adalah kredit usaha rakyat (KUR). KUR ditujukan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan pola penjaminan pemerintah. Data bank Indonesia

menunjukkan bahwa jumlah kredit bermasalah di kalangan UMKM relatif rendah, rata-rata berkisar antara 1 sampai 3 persen pada level nasional.

Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI, Dhaniswara K Harjono mengungkapkan Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki pelaku industri UKM namun jumlah tersebut tidak dibarengi dengan kualitas pendidikan pelaku UMKM yang diakuinya belum maksimal. Harus ada keberpihakan dari negara dan juga perlindungan termasuk perlindungan hukum.

Dalam hal ini, UMKM bisa dikatakan merupakan sektor strategis bagi pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Karena UMKM memiliki beberapa kelebihan, diantaranya : **pertama**, jumlah industri yang besar dan terdapat pada setiap sektor-sektor ekonomi. Berdasarkan data dari BPS 2002, jumlah UMKM tercatat 41,36 juta unit atau setara 99,9 persen dari total unit usaha. **Kedua**, potensinya sangat tinggi dalam penyerapan tenaga kerja. Saat ini UMKM di Indonesia per tahunnya mengalami pertumbuhan jumlah yang sangat pesat dengan penyerapan tenaga kerja mencapai lebih dari 90% dari total tenaga kerja di Indonesia yang didominasi oleh kalangan muda dan wanita. Sektor UMKM mampu menyerap 76,5 juta tenaga kerja dari total angkatan kerja yang bekerja. **Ketiga**, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup tinggi yaitu sekitar 55,3 persen dari total PDB. Dari data yang dihimpun BPS dari tahun 1998- 2012 grafik pertumbuhan UMKM selalu menanjak dari tahun ke tahun, saat ini saja UMKM Indonesia berjumlah 56,5 juta unit. Bisa dikatakan bahwa perkembangan UMKM selain menciptakan kesempatan kerja di masyarakat juga menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kesiapan UMKM Menghadapi MEA

UMKM di Indonesia telah terbukti mampu bertahan dari goncangan ekonomi dan menjadi penyelamat bagi perekonomian pada krisis keuangan tahun 1997 dan krisis global 2008. Untuk itu, kesiapan UMKM di Indonesia untuk menghadapi persaingan pasar bebas perlu dioptimalkan. Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan mengatakan bahwa persiapan Koperasi dan UKM nasional untuk menghadapi era MEA sudah cukup baik yaitu sekitar 60 sampai 70 persen. Sebagai persiapan, pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya strategis, salah satunya pembentukan Komite Nasional Persiapan MEA 2015, yang berfungsi merumuskan langkah antisipasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan UMKM mengenai

pemberlakuan MEA pada akhir 2015. Adapun langkah-langkah antisipasi yang telah disusun Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu pelaku UMKM menyongsong era pasar bebas ASEAN itu, antara lain peningkatan wawasan pelaku UMKM terhadap MEA, peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk UMKM lokal, penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Para Menteri Ekonomi ASEAN berpandangan bahwa integrasi ekonomi di kawasan perlu semakin diperdalam dengan fokus mengurangi hambatan-hambatan nontarif, peningkatan fasilitasi perdagangan kepada sektor bisnis khususnya UKM, dan pemerataan pembangunan di kawasan, sehingga integrasi ekonomi ASEAN dapat memberikan manfaat bagi seluruh Masyarakat ASEAN. Namun, salah satu faktor hambatan utama bagi sektor Koperasi dan UKM untuk bersaing dalam era pasar bebas adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM yang secara umum masih rendah. Sektor Koperasi dan UKM yang paling penting untuk dikembangkan dalam menghadapi MEA 2015 itu yang terkait dengan industri kreatif dan inovatif, handicraft, home industry, dan teknologi informasi.

Peningkatan daya saing dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), diperlukan para pelaku UKM di Indonesia untuk menghadapi persaingan usaha yang makin ketat, khususnya dalam menghadapi MEA. Sejauh ini dengan meningkatnya pemanfaatan TIK dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di dalam negeri yang didorong melalui kerja sama pemerintah dengan pihak swasta, daya saing UKM Indonesia pun makin meningkat. Data terbaru yang dikeluarkan oleh "World Economic Forum" bahwa peringkat daya saing UKM Indonesia naik dari nomor 52 menjadi nomor 38.

Indeks daya saing Indonesia (di antara negara ASEAN) 4,1 sama dengan Thailand, hanya kalah dari Singapura dan Malaysia. Penguatan industri kecil menengah (IKM) berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja dan menghasilkan barang atau jasa untuk dieskpor. Harapannya, Indonesia mampu menjadi *market leader* terutama di bangsa sendiri dan progresif dalam menghadapi pasar bebas.

Peluang Sektor UMKM dan Industri Kreatif dalam Menghadapi MEA

UKM mencakup 90% dari keseluruhan perusahaan di ASEAN. Telah disahkan *ASEAN Policy Blue Print for SME's Development 2004-2014*, yang bertujuan untuk menjamin adanya

transformasi UKM ASEAN yang memiliki daya saing, dinamis dan inovatif. Peluang Indonesia untuk dapat bersaing dalam MEA 2015 sebenarnya cukup besar, saat ini Indonesia merupakan peringkat 16 di dunia untuk besarnya skala ekonomi. Besarnya skala ekonomi juga didukung oleh proporsi penduduk usia produktif dan pertumbuhan kelas menengah yang besar

Bagi Indonesia, UKM memiliki peran dan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional, karena menyumbang 53,3% dari total PDB (Pendapatan Domestik Bruto). UKM di Indonesia bergerak di sektor pertanian, industri dan keuangan. Pertumbuhan UKM yang dimiliki perempuan di Indonesia berada pada peringkat tiga tertinggi di Asia Pasific (hasil penelitian *MasterCard*).

Keunggulan UKM dibanding Usaha Besar (*Nigel, 2012*) yaitu : inovasi teknologi mudah dilakukan dalam upaya pengembangan produk, hubungan kemanusiaan yang akrab terjalin dalam usaha kecil, kemampuan menciptakan kesempatan tenaga kerja yang cukup tinggi, fleksibel dan mudah menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat, dan manajerial yang dinamis dan peran kewirausahaan. UMKM dinilai lebih luwes jika dibandingkan dengan sektor usaha besar lainnya karena peran strategis UMKM mampu memberi kontribusi besar terhadap perekonomian riil Indonesia. PDB Indonesia tahun 2013 adalah US\$ 868,3 miliar, atau 30 persen dari PDB seluruh negara ASEAN. Jumlah penduduk Indonesia berpotensi menggunakan produk dalam negeri, yang akan mendorong industri skala besar dan memacu pertumbuhan UKM. Ketika MEA mulai berlaku pada akhir tahun 2015, UKM masih harus diperkuat lagi.

Pembentukan MEA memberikan peluang bagi negara-negara ASEAN untuk memperluas cakupan skala ekonomi, meningkatkan daya tarik sebagai tujuan bagi investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan dan memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis. Selain itu, pembentukan MEA juga akan memberikan kemudahan dan peningkatan akses pasar intra ASEAN serta meningkatkan transparansi dan mempercepat penyesuaian peraturan-peraturan dan standarisasi domestik.

Tantangan MEA Bagi Pelaku UMKM

Beberapa tantangan MEA seperti lapangan tenaga kerja yang ada di Indonesia hanya akan menaikkan angka pengangguran itu sendiri, karena tidak berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Bila Indonesia tidak siap, maka aliran bebas barang, jasa, investasi,

tenaga kerja terampil dan modal, terlihat sebagai ancaman daripada peluang. Tantangan yang dihadapi Indonesia tidak hanya bersifat permasalahan internal dalam negeri tetapi juga persaingan dengan negara lain seperti China dan India, termasuk kemampuan untuk menjadi pemain dalam MEA. Hal yang tak kalah penting adalah kemampuan Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Tantangan lainnya adalah jurang horizontal antara negara dengan kelas ekonomi maju dan yang masih menengah dan maju. Jurang vertikal antara negara yang demokratis liberal dan masih otoriter. Mindset masyarakat, khususnya pelaku usaha Indonesia yang belum seluruhnya mampu melihat MEA 2015 sebagai sebuah peluang. Bahkan menurut *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai ASEAN masih sangat terbatas. Harapannya dengan terwujudnya komunitas masyarakat ekonomi ASEAN ini dapat membuka mata semua pihak di segala aspek manapun.

Selain itu perlunya sinkronisasi program dan kebijakan pemerintah pusat dengan daerah. Sangat diperlukan kesamaan pandang diantara pejabat daerah dan pusat. *Global Competitive Index* oleh *World Economic Forum* menempatkan Indonesia pada urutan ke 38, dibawah sebagian negara ASEAN seperti Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand.

Tantangan lainnya yang perlu di evaluasi yakni lemahnya infrastruktur, khususnya bidang transportasi dan energi yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi, terutama juga bagi sektor produksi dan bagi pasar. Para pelaku usaha Indonesia juga *inward-looking* yakni besarnya pasar domestik mendorong pelaku usaha memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pasar domestik. Selain itu terbatasnya jumlah SDM yang kompeten untuk mendukung produktivitas nasional dan birokrasi yang belum efisien serta belum sepenuhnya berpihak pada pebisnis juga merupakan tantangan tersendiri.

Persaingan tenaga profesional meningkat, karena berbagai profesi, seperti: akuntan, arsitek, advokat dan tenaga kerja medis seperti dokter, boleh diisi oleh tenaga kerja asing. Selain itu, fundamental ekonomi Indonesia seperti kurs valuta asing, kurs rupiah, defisit neraca perdagangan, suku bunga yang tinggi, birokrasi dan penegakan hukum yang belum kondusif menjadikan tantangan bersaing dengan negara lain menjadi lebih ketat. Kurang daya promosi,

sejumlah produk Indonesia identik dengan produk negara lain, merupakan hambatan ekspansi Indonesia ke negara ASEAN.

Indonesia masih dalam transisi kepemimpinan baru, sehingga perlu waktu konsolidasi, sementara negara lain telah lebih dulu mempersiapkan diri, misalnya infrastruktur, peraturan perlindungan usaha, pengusaha, pendidikan, pembangunan kapasitas.

Strategi UMKM dan Industri Kreatif Sukses Menghadapi MEA 2015

UMKM menjadi salah satu sektor yang harus diberikan kebijakan yang mendukung agar dapat bersaing dengan UMKM dari negara ASEAN lainnya. Jika UMKM memiliki strategi dan persiapan yang cukup baik dalam menghadapi MEA 2015 bukan tidak mungkin perekonomian Indonesia dapat tumbuh dengan cepat seiring berjalannya MEA 2015.

Pemerintah dalam rangka menghadapi MEA telah menyiapkan kebijakan khusus untuk UMKM. Kebijakan yang pertama adalah peningkatan sentra atau klaster dalam upaya pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan *One Village One Product* atau OVOP. Kebijakan yang kedua yaitu akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kewirausahaan. Peningkatan sumber daya manusia menjadi sangat penting karena menjadi faktor utama terkait dengan perkembangan dan kemajuan UMKM dalam persaingan global. Sumber daya manusia merupakan kunci dari berhasil tidaknya, berkualitas atau tidaknya suatu hasil usaha. Untuk menghadapi MEA 2015, SDM yang dibutuhkan adalah SDM yang inovatif, kreatif, dan kompetitif. Jika tidak, maka orang asinglah yang akan berkuasa.

Selanjutnya kebijakan yang ketiga adalah dengan meningkatkan kualitas dan standarisasi produk UMKM. Hal itu bisa dilakukan dengan mendorong UMKM untuk memiliki sertifikat halal dan HAKI. Khususnya untuk memiliki Hak Cipta dan standarisasi, sehingga Kementerian Koperasi dan UKM menjalin kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan sertifikasi produk UMKM. Pemerintah bahkan berencana memberikan hak cipta secara gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan adanya MEA 2015, diharapkan seluruh produk-produk dalam negeri dapat “Go Internasional” yang mampu menembus pasar dunia.

Kebijakan yang keempat adalah penyiapan skema pembiayaan dengan bunga yang murah khususnya melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM yang saat ini sedang

menyiapkan kebijakan pembiayaan bagi UMKM. Selain itu program pembiayaan bagi pelaku UMKM dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) bersama Jamkrida dan Jamkrindo.

Sementara untuk mendukung akses UMKM kepada pasar ekspor, Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Pemerintah juga akan melakukan pengetatan pengawasan di daerah perbatasan atau border untuk menekan masuknya produk ilegal ke pasar domestik yang nantinya bisa sangat merugikan.

Keseluruhan hal tersebut dilakukan untuk mendorong produk UKM agar mampu bersaing di pasar dalam era MEA. Namun MEA sekaligus menjadi tantangan bagi UMKM agar bisa menguasai pasar dalam negeri agar tidak tergerus oleh UMKM negara lain.

Penutup.

MEA merupakan tantangan dan peluang bagi Negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia karena dengan dimulainya MEA berarti akan terjadi pasar bebas di ASEAN yang berakibat bebasnya keluar masuk barang dan jasa di seluruh kawasan ASEAN. Indonesia yang sangat kaya dengan Sumber Daya Alam dan jumlah penduduk yang banyak merupakan salah satu modal menghadapi MEA yang akan digulirkan mulai 31 Desember 2015 mendatang. SDA yang melimpah tidak menjamin bangsa Indonesia punya daya saing yang tinggi jika tidak diimbangi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang handal. Untuk menghadapi MEA 2015, SDM yang dibutuhkan adalah SDM yang inovatif, kreatif, dan kompetitif.

Untuk itu diperlukan kesadaran semua warga bangsa untuk selalu meningkatkan Etos kerja disegala bidang, sehingga dapat meningkatkan produksi dan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan agar mampu bersaing dengan Negara-negara lain di ASEAN.

SUMBER PUSTAKA

- Abdullah, Burhanuddin. (2006). *Menanti Kemakmuran Negeri*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Anggarani,Ari. (2015). *Penguatan Sektor UMKM Sebagai Strategi Menghadapi MEA 2015*. Jakara : Universitas Esa Unggul
- Gobel, Rachmat. (2015). *Persiapan Indonesia Hadapi MEA Sudah 90,5%*. *GATRA*, 24(21),10
- Kementrian Luar Negeri RI. (2014). *KTT ASEN Pertama Presiden Joko Widodo*. *ASEAN*, 6, 47
- Radhi, Fahmi (2010). *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat*. Yogyakarta : Republika Penerbit
- Suhendi, dkk (2014). *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Tambunan, Tulus. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta : LP3ES

sumber dari internet berikut ini

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/04/03/0652365/Mengapa.Anak.yang.Pintar.di.Sekolah.Bisa.Alami.Kesulitan.Ekonomi>.

<https://books.google.co.id/books?id=8WgQPyOQSjMC&pg=PA188&dq=kondisi+UMKM+di+indonesia&hl=en&sa=X&ved=0CDAQ6AEwA2oVChMI3Yzq3c-ZyAIVIL6OCh0JWwG6#v=onepage&q=kondisi%20UMKM%20di%20indonesia&f=false>

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=314540&val=4567&title=Penguatan%20Sektor%20Umkm%20Sebagai%20Strategi%20Menghadapi%20Mea%202015>

<https://books.google.co.id/books?id=11K9BgAAQBAJ&pg=PA52&dq=peluang+MEA+bagi+UMKM+majalah&hl=en&sa=X&ved=0CBoQ6AEwAGoVChMIjLSqkv2ZyAIVQ8WOCh0bpg8v#v=onepage&q=peluang%20MEA%20bagi%20UMKM%20majalah&f=false>

<https://books.google.co.id/books?id=t5-wCAAQBAJ&pg=PA32&dq=kesiapan+umkm+menghadapi+mea&hl=en&sa=X&ved=0CBoQ6AEwAGoVChMI3Olr-GZyAIVjAqOCh2IGwCe#v=onepage&q=umkm&f=false>

<https://books.google.co.id/books?id=Ak4GOXPigjIC&pg=PA179&dq=kondisi+UMKM+di+indonesia&hl=en&sa=X&ved=0CDcQ6AEwBGoVChMI3Yzq3c-ZyAIVIL6OCh0JWwG6#v=onepage&q&f=false>

https://www.academia.edu/10331907/KESIAPAN_INDONESIA_MENGHADAPI_MASYARAKAT_EKONOMI_ASEAN_2015